

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, Penulis memanfaatkan tiga penelitian terdahulu yang sangat berguna sebagai rujukan peneliti. Tiga penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain:

Jurnal No.1	Judul	Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya Bagi Perekonomian
	Peneliti	Daniel Darwis dan Theyana Howay; Universitas Cenderawasih, Jayapura – Papua
	Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari berita online, buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya.
	Hasil	Alasan utama keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah imigrasi yang diyakini dapat merugikan masyarakat Inggris. Terkait dengan masalah Warga negara Inggris karena kehadiran para imigran ini menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk kesempatan kerja antara imigran Uni Eropa dengan penduduk asli non-Uni Eropa dan Inggris. Ini juga mencatat pengabaian kedaulatan dan kepentingan nasional, karena semua aturan diatur oleh Uni Eropa, dan

		<p>meningkatnya skeptisisme Uni Eropa di antara masyarakat adat di Inggris. Situasi Brexit akan mempengaruhi ekonomi Inggris. Artinya, perekonomian Inggris akan mengalami kerugian karena beberapa sektor perekonomian Inggris cenderung menurun dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa. Sektor yang mengalami penurunan antara lain perdagangan, penanaman modal asing langsung (FDI), atau penanaman modal asing dan ketenagakerjaan, sedangkan sektor keuangan terkait mata uang sterling turun. Namun, dalam jangka panjang, Inggris seharusnya dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran tanpa ikatan lebih lanjut dengan Uni Eropa, sehingga situasi ini tampaknya berumur pendek. Hal ini terutama karena Inggris memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonominya dan memiliki daya tarik tersendiri bagi investor dan negara anggota lainnya, sehingga peluang untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa dan negara lain sebanyak mungkin didorong oleh peran Inggris dalam merebut Uni Eropa dan Negara Anggota Non-Uni Eropa.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Terdapat perbedaan yaitu jurnal ini berfokus pada implikasi ekonomi Inggris, sedangkan penulis berfokus pada pengaruh kebijakan Brexit terhadap perekonomian Inggris di kawasan Uni Eropa</p>

Jurnal No. 2	Judul	Pengaruh Brexit Terhadap Ekonomi Uni Eropa Di Masa Transisi Tahun 2020
	Peneliti	Jalu Tunjung Widura, Halifa Haqqi S.IP., M.Si, Hasna Wijayati S.IP., M.A; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
	Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder diperoleh dari web resmi dan berita.
	Hasil	Keluarnya Inggris akan memiliki dampak negatif yang cukup besar pada perekonomian Uni Eropa, dan Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya akan berkewajiban untuk menebus kekurangan keuangan akibat hilangnya kontribusi Inggris terhadap ekonomi Uni Eropa. Ini akan memastikan bahwa aliran ekonomi UE stabil selama masa transisi Brexit, dan bahwa perjanjian tersebut akan memungkinkan semua produk yang diproduksi di Inggris memiliki akses bebas bea ke pasar tunggal UE. Selain itu, tidak ada tarif bea masuk yang ditetapkan untuk barang yang melintasi wilayah Inggris dan UE. Karena Brexit, semua pengusaha yang masuk atau transit di Inggris dan Uni Eropa harus membayar bea masuk.
	Perbedaan	Jurnal ini lebih membahas tentang keadaan ekonomi Negara anggota Uni Eropa setelah

		melakukan referendum Brexit dan masuk ke masa transisi. Sedangkan penulis meneliti tentang ekonomi Inggris setelah melakukan Brexit di Kawasan Uni Eropa.
Jurnal No.3	Judul	Potensi Dampak Brexit Terhadap Perekonomian Inggris
	Peneliti	Muhammad Farhan Anshari Rusdiyanta
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berisi buku, jurnal dan media elektronik.
	Hasil	Setelah pemungutan suara Brexit, Inggris dan Uni Eropa melanjutkan negosiasi ekonomi di sejumlah bidang, dengan peraturan perdagangan non-tarif yang paling mendapat perhatian. Meskipun bukan satu-satunya pendorong untuk meninggalkan Uni Eropa, ekonomi adalah pendorong utama. Sementara kami berpikir bahwa tujuan utama dari Brexit adalah agar Inggris mengalami pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berada dalam posisi yang lebih baik daripada sekarang untuk mengembangkan sektor ekonominya, status Inggris sebagai anggota Uni Eropa membuatnya istimewa. dalam beberapa cara. laba. Setelah referendum Brexit, perdagangan di Inggris sejauh ini menurun. Penurunan produktivitas dan nilai pound adalah

		<p>indikatornya. Inggris adalah salah satu negara maju dengan tingkat FDI, atau investasi langsung asing tertinggi. Inggris menerima sekitar dua perlima dari investasi asingnya dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kontribusi Uni Eropa terhadap perluasan investasi asing di Inggris. Karena pusat negara-negara maju saat ini lebih tertarik pada negara-negara anggota Uni Eropa daripada negara-negara maju lainnya seperti China dan India, maka investasi asing dari negara-negara non-Uni Eropa lebih sedikit daripada dari negara-negara Uni Eropa. Para penulis mengklaim bahwa bangsa tidak akan mampu bersaing dengan manfaat investasi yang diperoleh setelah memasuki Uni Eropa.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Jurnal ini menggunakan pendekatan teori Integrasi Regional sebagai alat bantu penelitian ini sedangkan penulis memakai pendekatan sedangkan penulis menggunakan pendekatan teori yaitu teori ekonomi internasional, teori pertumbuhan ekonomi dan teori kepentingan nasional.</p>

2.2 Kerangka Teori

Melalui penelitian ini penulis membahas dasar teori ini untuk menjelaskan teori terhadap pengaruh kebijakan Brexit terhadap perekonomian Inggris di kawasan Uni Eropa. Penelitian ini menjelaskan

perspektif, tingkat analisa, dan konsep yang berkaitan guna memberikan gagasan yang relevan dengan penelitian. Perspektif yang digunakan penulis adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Teori Kepentingan Nasional. Pengertian Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kepentingan Nasional akan dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1. Teori Neoliberalisme

Teori ini muncul setelah adanya Perang Dingin. Teori ini adalah hasil dari perspektif Liberalis klasik. Neoliberalisme adalah teori yang menggambarkan gagasan rasionalitas dan kontrak sehubungan dengan hukum internasional. Martin (2007) menegaskan bahwa teori ini juga menekankan fungsi organisasi dan institusi dalam politik global. Bagaimana mencapai kerjasama antara negara dan peserta sistem lainnya adalah perhatian utama teori neoliberal. Seperti Keohane (1984:51) yang berpendapat ketika suatu bangsa dapat mengubah pola perilakunya agar sesuai dengan keinginannya, maka kerjasama internasional dapat terjadi. Dalam hal ini, suatu kebijakan dapat dikatakan dilaksanakan oleh satu pemerintah dan digunakan sebagai alat oleh para mitra untuk mencapai tujuannya sendiri.

Metode untuk meneliti organisasi internasional dan pola kerjasama ini sering dianggap sebagai pendekatan terkemuka dalam sejarah neoliberalisme. Neo-liberalisme melibatkan berbagai aktor, bukan hanya negara; aktor non-negara memainkan peran penting

juga. Misalnya, pertimbangkan perusahaan multinasional, organisasi internasional, LSM, dan organisasi pemerintah internasional (IGO) (MNC). Berpengaruh, tapi dampaknya tidak terlalu besar, tetap negara. Neoliberalisme berpendapat bahwa kolaborasi diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin muncul dalam sistem internasional yang anarkis untuk mendorong saling ketergantungan.¹

Di Baldwin, Krasner (1991) menekankan bagaimana neoliberalisme mengangkat niat, minat, dan informasi di atas kapabilitas sambil membahas hubungan antara kapabilitas dan niat. Peningkatan kapabilitas, menurut kaum neoliberalis, bukanlah prioritas karena kolaborasi memungkinkan suatu bangsa hidup dalam anarki. Mengenai rezim dan institusi, neorealis percaya bahwa entitas ini menempatkan fokus yang kuat pada peran mereka dalam sistem internasional karena mereka mengantisipasi bahwa negara akan lebih mungkin untuk bekerja sama satu sama lain sebagai hasilnya.

Lebih lanjut, diklarifikasi bahwa alasan mendasar mengapa banyak kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis gagal pada 1960-an dan menimbulkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan adalah penyebab utama munculnya neoliberalisme. Krisis dalam bentuk stagflasi di negara-negara industri pada tahun 1970-an menjadi katalis bagi terciptanya neoliberalisme, seperti

¹ Lamy, Steven L. 2008. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. Dalam Baylish, John and Smith, Steve, ed. The Globalization of World Politics and Introduction to International Relations. eds: New York: Oxford University Press.

yang terjadi pada teori ekonomi lainnya. Krisis ini memberikan angin sakal untuk memerangi kubu pro-intervensi dan mengembalikannya sebagai wacana kebijakan ekonomi yang mendominasi. Di banyak negara, kebijakan neoliberal terbukti efektif menurunkan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak Margaret Thatcher menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1979, ekonomi Inggris membaik. Mirip dengan bagaimana Ronald Reagan berhasil mengurangi inflasi dan pengangguran selama dua masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat (1981–1989). Keduanya menjalankan program privatisasi, deregulasi, dan pengurangan pajak serta subsidi.²

Neoliberalisme secara keseluruhan bukanlah teori yang sangat kompleks karena hanya memperbarui konsep liberalis sebelumnya dengan memperkenalkan ide-ide baru sambil meninggalkan yang lama.³ Perbedaan antara liberalisme dan neoliberalisme dilihat dari perspektif yang lebih neoliberal adalah bahwa mereka benar-benar mengakui bahwa konflik dan perang pasti akan muncul dalam semua hubungan internasional; akibatnya, mereka juga menegaskan bahwa kerja sama tetap diperlukan untuk mencegah konflik. Aspek politik ekonomi, lingkungan, dan perhatian yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga merupakan titik fokus neoliberalisme.⁴

² Chaniago, Siti Aminah.(2010). Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. Jurnal Hukum

³ Jackson, Robert & Sorensen, G., 1999. Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press Inc.

⁴ Lamy, Steven, L., 2008. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. Dalam: Baylish, John & Smith, Steve, ed. The Globalization of World Politics and Introduction to International Relations, eds. New York: Oxford University Press.

Secara global, gagasan liberalisme yang sudah ketinggalan zaman sekali lagi mendapatkan daya tarik. Itu dibuat melalui "perjanjian" yang dipaksakan, khususnya Konsensus Washington tahun 1980-an. Pembela ekonomi pasar bebas, termasuk Bank Dunia, IMF, dan pejabat negara kaya, serta perwakilan perusahaan besar seperti Korporasi Transnasional (TNC) atau Perusahaan Multinasional (MNC), berkontribusi pada konsensus. Dalam periode global, mereka menyebut kesepakatan itu sebagai "Reformasi" ekonomi dengan menggunakan prinsip pasar bebas. Kuncinya adalah negara harus bertindak untuk kepentingan sektor swasta dan memberikannya fleksibilitas untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar (bukan hanya keuntungan).

John Williamson, seorang ekonom yang merumuskan Washington Consensus ke dalam sepuluh butir kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Disiplin Fiskal

Dalam situasi ini, hampir semua negara menerapkan sistem defisit anggaran untuk menyeimbangkan krisis neraca pembayaran dan tingkat inflasi yang tinggi. Karena orang-orang kaya menyimpan uang mereka di luar negeri, negara-negara miskin sangat terpengaruh oleh masalah ini.

2. Prioritas Pengeluaran Pajak

Dalam situasi ini, kesepakatan umum mendukung pengalokasian dana pemerintah untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, seperti subsidi

kesehatan dan pendidikan.

3. Reformasi Pajak

Yaitu, membuat suatu model yang mengkombinasikan basis pajak yang luas dengan tingkat pajak yang rendah.

4. Liberalisasi Suku Bunga

Yaitu, tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar dan positif secara riil.

5. Tingkat nilai tukar yang kompetitif.

6. Liberalisasi perdagangan terutama penghapusan lisensi dan tarif tunggal.

7. Liberalisasi investasi asing langsung.

8. Privatisasi BUMN

9. Deregulasi

Penghapusan regulasi yang menghambat persaingan kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan.

10. Perlindungan hak milik.

Intinya, perspektif neoliberal ini mengadvokasi *laissez faire* (persaingan bebas), khususnya perspektif yang mendukung hak atas kepemilikan properti dan kebebasan pribadi. Alih-alih menggunakan peraturan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, mereka lebih percaya pada kekuatan pasar. Namun pada kenyataannya, apa yang disebut negara-negara maju kapitalis di Eropa, Amerika, dan Asia tidak sepenuhnya menerapkan

perekonomian dengan mekanisme pasar bebas karena masih ada bantuan pemerintah berupa subsidi, tunjangan, dan fasilitas sosial bagi kalangan menengah ke bawah. kelas, melindungi industri atau produk lokal dari persaingan dengan barang impor.⁵

Kajian penelitian yang dilakukan Chaniago (2019) juga menunjukkan kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dari Sistem Ekonomi Neoliberal, berikut ini adalah penjelasannya:

1. *Strength* (kekuatan)

- Pertumbuhan ekonomi tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak ada aturan yg membatasi kemampuan investasi
- Efek multiplier/domino (misalnya, daya beli meningkat, permintaan meningkat sehingga orang membeli lebih banyak sehingga bisnis untung), investasi meningkat, PDB meningkat, gaji naik, daya beli masyarakat naik, daya beli masyarakat naik, dan seterusnya) mengakibatkan peningkatan daya beli masyarakat secara umum (stimulus, kenaikan upah minimum regional) berkurang secara sosial.

2. *Weakness* (kelemahan)

Kurangnya regulasi sebagai akibat dari kurangnya kontrol pemerintah. Penindasan pihak yang kuat oleh

⁵ Chaniago, Siti Aminah. (2010). Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. Jurnal Hukum

pihak yang lemah akan meluas dan digunakan secara luas untuk keuntungan finansial. Hasilnya adalah masyarakat mulai membelanjakan uang secara berlebihan dan akhirnya terlilit hutang.

3. *Opportunity* (peluang)

- Pendanaan untuk ekspansi ekonomi lebih besar dan berasal dari sumber swasta juga. Dengan banyaknya pihak yang berinvestasi, semakin banyak lapangan kerja yang dapat dihasilkan, dan prospek bisnis yang melimpah karena ekonomi akan berkembang dengan cepat.
- Akan bermunculan peluang-peluang bisnis baru

4. *Threat* (ancaman)

- Kekayaan tidak akan merata. GDP bisa naik namun rakyat bisa menderita.
- Pihak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Neoliberalisme sesungguhnya tidak lebih dari kumpulan gagasan yang menentang keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Ide-ide ini sangat bervariasi dan terkadang bertentangan dengan akar neoklasik.

2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang dalam bahasa Prancis yaitu *raison d'Etat* adalah hal yang bertujuan dengan ambisi Negara. Mulai dari ekonomi, militer, maupun budaya. Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan mendasar antara kepentingan nasional vital dan sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital merupakan kepentingan yang dinilai dari seberapa darurat keputusan yang akan diambil. Berbeda dengan kepentingan nasional yang bersifat sekunder yang dinilai dari proses yang lama dari suatu kepentingan yang hasilnya akan dirasakan di kemudian hari dalam



jangka waktu yang cukup panjang.⁸ Kepentingan didasari oleh “kekuatan” yang ingin diciptakan oleh negara untuk memberikan dampak langsung terhadap pertimbangan yang akan didapat dari pengakuan dunia.

Proses mempertahankan atau melancarkan serangan terhadap sasaran kepentingan nasionalnya tentu melibatkan semua



bangsa. Setiap negara mendasarkan kebijakan luar negerinya pada kepentingan nasionalnya dan mengejar kepentingan tersebut setiap saat. Kepentingan nasional memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti ekonomi, ideologi, keamanan dan kekuatan militer, moralitas dan juga legalitas. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang menjadi aspek yang diutamakan untuk meningkatkan perekonomian bersama setelah terjadinya Brexit.⁹ Dalam merumuskan kepentingan nasional ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan negara untuk menjalankan peranan penting yang mencakup kekuasaan untuk menjalankan strategi-strategi demi mencapai kepentingan nasional.

Tujuan inti dan faktor kunci dalam memilih pembuat keputusan nasional atau membentuk kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan Nasional sebagai konsep Hans J. Morgentau dan rekan Pertama, integritas teritorial memungkinkan

⁸ Jemadu, 2008: 67-69

⁹ Daniel S. Papp, 1988

pelestarian perlindungan identitas fisik. Yang kedua adalah pelestarian identitas politik dalam hal kapasitas seseorang untuk menegakkan sistem politik dan ekonominya. Ketiga, perlindungan budaya dari segi sejarah dan bahasa. Kepentingan nasional dapat berbenturan dengan kebijakan lain karena merupakan kreasi pembuat dan dapat terus dilakukan. Anda dapat mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kepentingan nasional.¹⁰

Bagi Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional, beserta isinya, mencakup berbagai makna, dengan kekuasaan (*Power*) dan keuntungan (*Interest*) secara logis berfungsi sebagai sarana sekaligus tujuan. Tradisi politik dan konteks tindakan politik internasional menentukan budaya dalam kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang ditentukan oleh masing-masing negara juga dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar. Faktor-faktor Penting yang Mempengaruhi Mereka yang Membuat Keputusan Kebijakan Luar Negeri Biasanya, tuntutan paling krusial suatu negara, seperti pertahanan, keamanan, kekuatan militer, dan pembangunan ekonomi, ditentukan oleh kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional berfungsi sebagai tujuan utama dan faktor penentu untuk memilih pengambil keputusan nasional atau menentukan kebijakan luar negeri. Gagasan Hans J. Morgentau dan

¹⁰ Yani, dkk. 2017: 17

rekannya tentang kepentingan nasional Pemeliharaan identitas tubuh pertama-tama didukung oleh integritas teritorial. Kekuatan untuk mengamankan sistem politik dan ekonominya adalah yang kedua, yaitu pemeliharaan identitas politik. Ketiga, pelestarian budaya dari segi bahasa dan sejarah. Karena dibuat oleh pembuatnya dan masih bisa dilakukan, kepentingan nasional bisa berbenturan dengan kebijakan lain. Kepentingan nasional dapat diringkas sebagai kepentingan nasional.

Ketika merumuskan kepentingan nasional, kemampuan suatu negara harus diperhitungkan, yang menariknya ke dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran penting dalam implementasi strategi kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, dilihat dalam kaitannya dengan kemampuannya sendiri dan orang lain, diringkas dalam apa yang dikenal sebagai kekuatan. Namun, kapasitas ini adalah definisi kekuasaan yang statis, dan mempertimbangkan interaksi dan perilaku interaksi antar negara menghasilkan rentang definisi kekuasaan yang dinamis. Ketahanan dan kekuatan suatu bangsa dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya sendiri. Karena menyiratkan rasa ketahanan yang terintegrasi dalam semua aspek kehidupan nasional, termasuk keamanan ideologis, sosial budaya, ekonomi, keamanan nasional dan politik berbeda dari pertahanan. Untuk mengatasi dan

melestarikan kehidupan bangsa dan kemegahannya, ketahanan nasional didasarkan pada persatuan dan kesatuan yang dinamis.¹¹

Untuk mewujudkan kepentingan nasional kita, kita perlu fokus dan mengambil tindakan pada dua hal. Keduanya adalah moralitas dan akal. Kata "masuk akal" menunjukkan perilaku yang digerakkan oleh tindakan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, hanya berdasarkan pilihan aktor itu sendiri, tindakan dapat diklasifikasikan sebagai wajar atau irasional. Preferensi ada ketika pembuat keputusan berada dalam pola pikir yang paling cocok untuk pengambilan keputusan logis, memiliki semua informasi faktual terkait, dan selalu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Meskipun pada prinsipnya ada seperangkat kriteria untuk menilai rasionalitas tindakan yang terkait dengan tujuan tertentu, ada posisi moral yang berbeda dan sering bertentangan.

Bahkan memilih aktivitas yang memenuhi semua persyaratan rasionalitas dapat dianggap tidak bermoral. Secara umum diakui bahwa standar nalar bahkan tidak dapat mencakup pemilihan di antara kepentingan pribadi yang bertentangan. Mereka tetap terikat oleh moral. Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa moralitas diperlukan untuk rasionalitas. Oleh karena itu, kepentingan nasional diupayakan sesuai dengan moralitas

¹¹ Rudy, 2002: 116

masyarakat yang berlaku di mana terdapat kepentingan nasional yang logis dan bermoral.

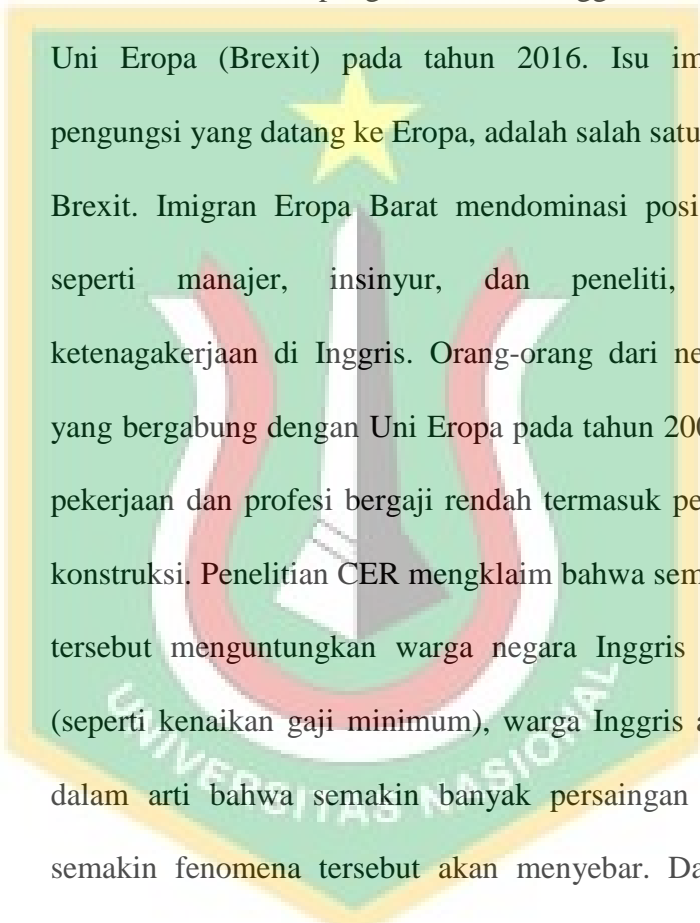
Menurut Nuechterlein, ada kepentingan dasar yang dibagi menjadi 4 yang memotivasi negara untuk mengklaim kepentingan nasional. Pertama, kepentingan defensif untuk melindungi negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain. Yang kedua adalah manfaat ekonomi. Artinya, kepentingan dalam meningkatkan perekonomian negara dengan mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Ketiga, kepentingan dalam menjaga tatanan dunia memiliki tujuan untuk menjaga tatanan ekonomi dan politik global di mana negara-negara merasa aman dan di mana orang dapat hidup dalam damai.

Dan yang keempat adalah kepentingan ideologis suatu negara dalam melindungi nilai-nilai ideologisnya dari ancaman ideologis negara lain.¹² Karena kebutuhan tersebut memaksa negara untuk menegaskan kepentingannya nasionalnya, karena jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, suatu negara tidak akan mampu bersaing dalam politik internasional. Apa itu Politik Luar Negeri? Pada dasarnya, kebijakan luar negeri adalah hasil dari definisi progresif negara dan mengejar tujuan dan kepentingannya di

¹² Williams 2012, 33

lingkungan internasional. Ini adalah perluasan luar negeri dari kebijakan nasional.¹³

Salah satu contoh tumbuhnya bahasa kepentingan nasional sebagai faktor utama tindakan sepihak suatu negara di kancah internasional adalah pengunduran diri Inggris dari keanggotaannya



Uni Eropa (Brexit) pada tahun 2016. Isu imigran, termasuk pengungsi yang datang ke Eropa, adalah salah satu penyebab utama Brexit. Imigran Eropa Barat mendominasi posisi bergaji tinggi seperti manajer, insinyur, dan peneliti, menurut data ketenagakerjaan di Inggris. Orang-orang dari negara-negara A8, yang bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, mendominasi pekerjaan dan profesi bergaji rendah termasuk pekerja pabrik dan konstruksi. Penelitian CER mengklaim bahwa sementara fenomena tersebut menguntungkan warga negara Inggris secara langsung (seperti kenaikan gaji minimum), warga Inggris adalah fenomena dalam arti bahwa semakin banyak persaingan dengan Inggris, semakin fenomena tersebut akan menyebar. Dan ini saja akan menyebabkan gejala pada warga Inggris memburuk.¹⁴

Hal ini sesuai dengan teori Ernest Goerner bahwa imigrasi dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi negara dan intoleransi warganya. Dia berpendapat bahwa "negara tuan rumah" perlu

¹³ Hyndman 1970/1971, 10

¹⁴ Bima J. N & Inda M. P, 2017

menolak koeksistensi dengan anggota budaya lain dan tunduk pada aturan kelompok dominan sesuai dengan teori nasional. Dengan kata lain, melestarikan budaya nasional dan menjauhkan orang luar yang tidak menghormatinya dapat memajukan kepentingan nasional.¹⁵

Meski menjadi negara besar dan negara merdeka dalam banyak

bidang sepanjang sejarahnya, kedaulatan dan kepentingan nasional

terabaikan karena semua regulasi dikuasai oleh Uni Eropa, sehingga terjadi imigrasi. Masalah tersebut dinilai sangat merugikan Inggris.

Negara ini menjadi pendiri revolusi industri yang berdampak besar

pada sistem ekonomi dunia. Menurut penulis, ini kemungkinan

merupakan alasan utama keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Seperti

peraturan yang telah diatur oleh Uni Eropa mengenai imigran,

bahwa jika salah satu negara anggota memiliki permasalahan, maka

akan dibantu oleh negara-negara anggota lainnya. Brexit berawal

dari pertimbangan kepentingan nasional yang mengedepankan

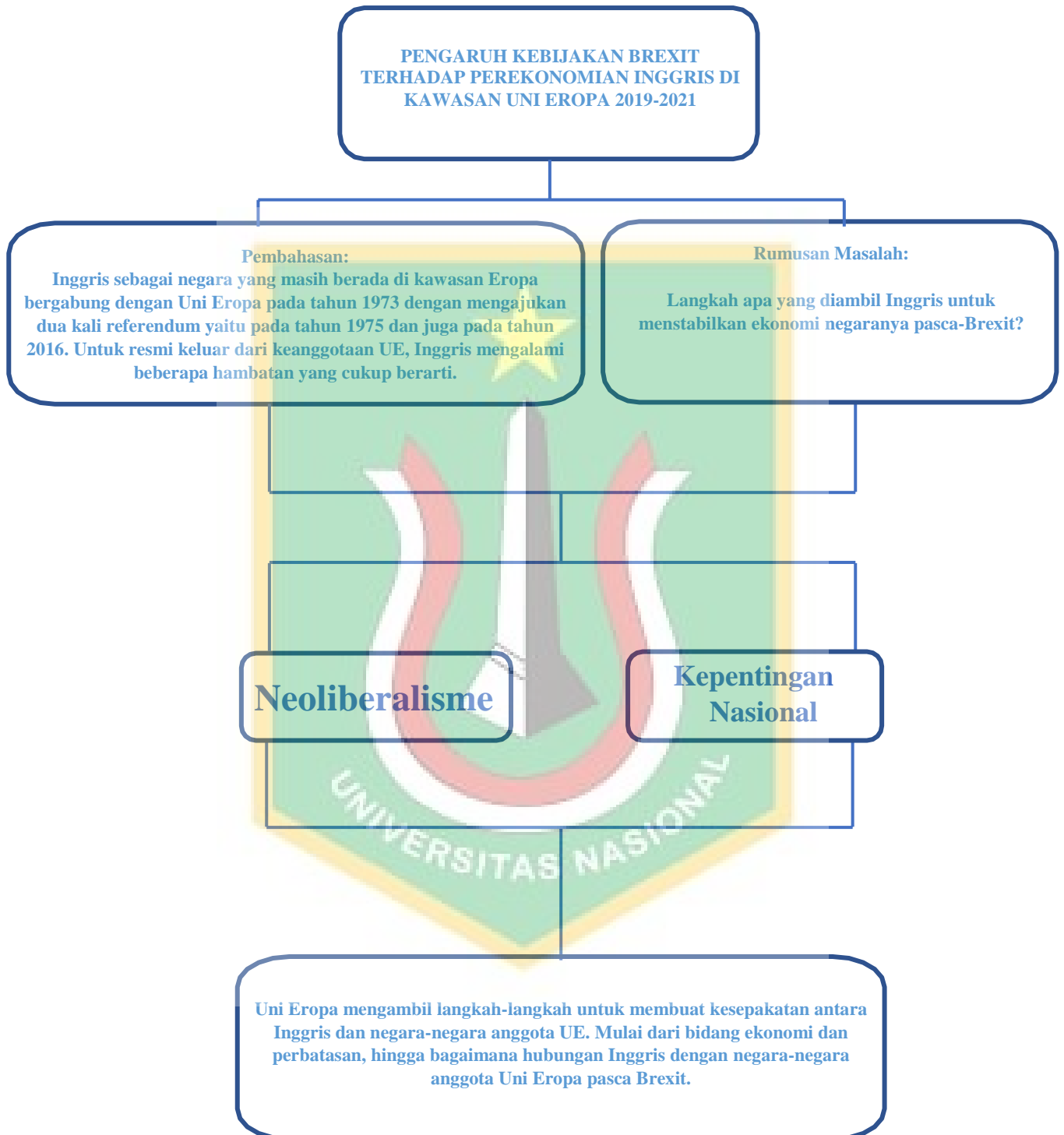
keamanan bangsa dan negara mereka, kemudian Inggris juga

mengimplementasikan di dalam negeri dengan mengeluarkan

kebijakan pemerintah yang mengatur tentang imigrasi.

¹⁵ Y. Eka, 2016

2.3. Kerangka Pemikiran



Bagan 1 Kerangka Pemikiran

Dari penelitian diatas penulis memfokuskan penelitian pada pernyataan dimana Inggris menempatkan urutan ke-2 memiliki imigran terbanyak setelah Jerman. Dikarenakan Inggris merasa kebijakan imigran Uni Eropa sangat bersahabat dengan para imigran yang mengakibatkan bertambahnya imigran di Inggris; Inggris merasa tidak cocok bagi masyarakat Inggris yang kurang toleran terhadap Imigran karena mereka merasa jika para imigran ini merebut lahan pekerjaan mereka dan juga ada beberapa oknum yang tidak menaati peraturan Pemerintah Inggris.



Sehingga membuat pemerintah menyatakan referendum pada tahun 2016 Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dan teori kepentingan nasional dengan tujuan untuk melihat apakah dampak yang diberikan Inggris pada perekonomian negara-negara Uni Eropa maupun ke negaranya sendiri. Inggris berusaha untuk keluar dari Uni Eropa agar dapat mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh masyarakat Inggris. Namun, Inggris mengalami penurunan pada perekonomian negaranya dimasa transisi Brexit.

